

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R Soeprapto No. 9 Padang. Telp : (0751) 7052725-7059511 Fax : (0751) 7059511
Website: <http://dishut.sumbarprov.go.id>
E-mail : skpd@dishut-sumbarprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN

PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH



OPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon II/III	:	Sekretariat
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Hasil (Outcome)	:	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah 85%
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Keluaran (Output)	:	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (1 Dokumen)
DPA-SKPD	:	
Nilai	:	Rp.205.000.000,- (Dua Ratus Lima Juta Rupiah)

PADANG, OKTOBER 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

OPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon II/III	:	Sekretariat
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Hasil (Outcome)	:	Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah 85%
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Keluaran (Output)	:	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (1 Dokumen)
DPA-SKPD	:	
Nilai	:	Rp.205.000.000,- (Dua Ratus Lima Juta Rupiah)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Merujuk pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017, salah satu tugas dan fungsi Sub Bagian Program Anggaran adalah menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang program anggaran di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023. Sub kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan.

Terkait pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 tersebut, didasarkan atas :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216 /PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Reboisasi;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat NomorTahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;
 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (3.28.01.1.01.01)

2. Gambaran Umum

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu institusi pemerintah yang mempunyai tugas mengurus bidang kehutanan. Dalam pelaksanaan tugas bidang kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan turut serta menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Terselenggaranya pemerintah yang bersih yang merupakan prasyarat setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan organisasi, aspirasi masyarakat serta cita-cita bangsa dan negara.

Dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 yang telah ditetapkan. Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Renstra ini telah dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari sasaran, program dan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2023 memuat Program, Kegiatan Pokok, Anggaran dan Sasaran pada masing-masing sub unit kerja secara kolektif, sehingga kebijakan prioritas yang telah dirancang tercermin dalam kegiatan pokok pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan dan menyusun dokumen anggaran. Dokumen perencanaan yang disusun adalah Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sedangkan dokumen anggaran yang disusun adalah Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pergeseran Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Dengan adanya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat menyerap aspirasi rencana kegiatan pembangunan kehutanan di daerah (Kabupaten/Kota) melalui 10 (sepuluh) UPTD KPH dan 1 (satu) UPTD BSPTH untuk mendukung penyelesaian permasalahan kehutanan di daerah. Guna

mewujudkan hal tersebut maka diperlukan koordinasi ke 10 (sepuluh) UPTD KPH dan 1 (satu) UPTD BSPTH dalam bentuk perjalanan dinas yang bertujuan untuk melengkapi bahan/data/informasi serta mendapatkan formulasi-formulasi baru sebagai referensi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran SKPD Dinas Kehutanan 2023.

B. Penerima Manfaat

Dengan teridentifikasinya permasalahan-permasalahan program/kegiatan sebagai upaya bagi penentu tindakan-tindakan korektif berdasarkan rencana yang telah ditetapkan serta mengetahui pencapaian hasil kemajuan kegiatan dan kendala pelaksanaan kegiatan di lapangan guna perbaikan pada tahun yang akan datang, kemudian tersedianya data dan informasi pembangunan bidang kehutanan Sumatera Barat dan perkembangan pembangunan kehutanan sebagai dasar perencanaan ke depan, maka penerima manfaat atas tercapainya Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 ini adalah :

1. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, UPTD BSPTH, UPTD KPH
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (SKPD lain yang terkait, seperti Bappeda)
3. Pemerintah Pusat
4. Sub Bagian Program Anggaran

C. Strategi Pencapaian

1. Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan metode pelaksanaan secara swakelola, dengan uraian sebagai berikut :

a. Administrasi Kegiatan

- ✚ Pembuatan Term of Referen ce (TOR).
- ✚ Pembuatan Rincian Anggaran Biaya (RAB).
- ✚ Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.
- ✚ Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (Juklak)

b. Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Bimbingan Teknis Sistem Perencanaan dan Pelaporan

Kegiatan ini dilakukan secara bertahap ke UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah seluruh data yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam pelaksanaan ini akan dilakukan bimbingan yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan dan pelaporannya seperti hal-hal apa saja yang harus dilengkapi dalam perencanaan suatu kegiatan dan hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam pelaporan kegiatan serta bagaimana sistematika pelaporan dari setiap sub kegiatan.

2) Konsinyasi Penyusunan Perencanaan Program Anggaran

Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan konsinyasi. Data yang dibutuhkan pada saat konsinyasi adalah rancangan RKA awal/informasi terkait penganggaran pada UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa indikator dan kriteria yang harus diperhatikan. Adapun penetapan indikator dan kriteria penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan beserta hasil-hasilnya harus jelas, tepat dan terukur. Adapun indikator dan kriteria penilaian dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran SKPD, meliputi :

- ✚ Kesesuaian anggaran dengan perencanaan
- ✚ Kesesuaian anggaran dengan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- ✚ Penyerapan anggaran kegiatan
- ✚ Ketersediaan dokumen-dokumen pendukung
- ✚ Produk atau hasil pelaksanaan kegiatan

Kriteria penilaian dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran:

- ✚ Kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan
- ✚ Kesesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku

Untuk pelaksanaan penilaian anggaran dilakukan melalui konsinyasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

3) Rapat Koordinasi Pembangunan Kehutanan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang seluruh Bidang dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini akan dipaparkan target dan pencapaian kinerja dinas kehutanan serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menjadi penghambat dalam pembangunan kehutanan sehingga akan dapat hasil yang optimal dan maksimal pada akhir tahun pelaksanaan pembangunan kehutanan.

4) Pengumpulan, Validasi dan Rekonsiliasi Data

Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi ke UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Data yang diambil adalah data informasi terkait perencanaan pembangunan kehutanan pada wilayah kelola UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

5) Forum OPD

Forum OPD merupakan pertemuan untuk melakukan koordinasi dalam rangka mensinkronkan program dan kegiatan pembangunan kehutanan antara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPT Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki wilayah kelola di Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan ini dilakukan melalui metode paparan oleh narasumber terkait dengan rencana pembangunan kehutanan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan di tahun 2022 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mensinkronkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2023.

6) Konsultasi dan koordinasi perencanaan program anggaran

Kegiatan ini dilakukan untuk harmonisasi antara rencana kegiatan yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan rencana kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

7) Pelaporan

Pelaporan kegiatan berupa laporan akhir kegiatan.

b. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap kondisi fisik dan non fisik kegiatan melalui pengamatan lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan data primer adalah :

- ✓ Menghitung dan mengukur hasil kegiatan/pekerjaan dengan menggunakan metode sampling untuk kegiatan fisik.
- ✓ Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar teknis yang dimuat di juklak/juknis pelaksanaan kegiatan yang dimonitoring dan evaluasi.
- ✓ Mengambil/membuat dokumen hasil pelaksanaan kegiatan/pekerjaan fisik yang dievaluasi.

c. Kesimpulan dan Rekomendasi

- ✓ Menarik kesimpulan berdasarkan analisis, penilaian kinerja, dan temuan-temuan seta mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan, faktor pendukung/penghambat dalam pelaksanaan kegiatan.
- ✓ Membuat Laporan Akhir Kegiatan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan dalam pencapaian sasaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 yang berada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Jadwal pelaksanaan masing-masing komponen dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana pada tabel berikut :

NO	URAIAN	PELSAKSANAAN KEGIATAN											
	Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Alat Tulis Kantor												
2	Belanja Bahan Bakar Minyak												
3	Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis												
4	Belanja Cetak dan Penggandaan												

5	Bimtek Perencanaan dan Pelaporan											
6	Forum OPD											
7	Belanja Makan dan Minum Kegiatan											
8	Konsinyasi UPTD KPH ke Provinsi											
9	Pengumpulan Data Perencanaan ke Kab/Kota											
10	Rapat koordinasi pembangunan kehutanan											
11	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan ke Pusat											
12	Pengumpulan, validasi dan rekonsiliasi data											

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilakukan selama satu tahun berjalan.

E. Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disalurkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

Biaya yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.205.000.000,- (Dua Ratus Lima Juta Rupiah) rincian biaya dalam bentuk RAB (terlampir).

Padang, Oktober 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Ir. MASWAL NOOR, M.Si
NIP. 19670122 199301 1 001

RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun					1 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 205.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 205.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 47.233.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 47.233.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 12.900.000
	[#]					Rp. 37.425.000
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	700 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 8.925.000
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	300 Liter	Liter	13.250	0	Rp. 3.975.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.572.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	40 Rim	Rim	63.000	0	Rp. 2.520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	40 Rim	Rim	51.300	0	Rp. 2.052.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.961.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	8 M2	M2	45.000	0	Rp. 360.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	20 Eksemplar / Buku	Eksemplar	69.000	0	Rp. 1.380.000
	[#] Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.221.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20884 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 5.221.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.800.000
	[#]					Rp. 45.620.000
	[-] Forum OPD					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 2.200.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 1.700.000
	[#] Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.900.000
	[-] Konsinyasi Penyusunan Perencanaan Program Anggaran					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 1.700.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 2.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 11.200.000
	[#]					Rp. 11.000.000
	[-] Forum OPD					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.600.000
	[-] Konsinyasi Penyusunan Perencanaan Program Anggaran					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 2.500.000
	[#]					Rp. 5.000.000
	[-] Forum OPD					
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Aula Besar Istana Bung Hatta	1 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp. 2.500.000

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 144.067.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 144.067.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 144.067.000
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	3.332.000	0	Rp. 3.332.000	
	Penginapan Pejabat Eselon III/Go.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp. 2.706.000	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Go.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	12 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 7.800.000	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 300.000	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	46 Orang / Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 17.480.000	
[-] Pengumpulan, Validasi dan Rekonsiliasi Data Earmark							
	Penginapan Pejabat Eselon III/Go.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp. 4.059.000	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Go.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 13.650.000	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 18.240.000	
[-] Pengumpulan, Validasi dan Rekonsiliasi Data Perencanaan Program Anggaran ke Kepulauan Mentawai							
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp. 1.500.000	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Go.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 3.900.000	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 3.420.000	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Go.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 15.600.000	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 18.240.000	
[#] Penginapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 15.600.000	
[-] Pengumpulan, Validasi dan Rekonsiliasi Data Perencanaan Program Anggaran							
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Go.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 15.600.000	
[#] Uang Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 18.240.000	
[-] Pengumpulan, Validasi dan Rekonsiliasi Data Perencanaan Program Anggaran							
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 18.240.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 205.000.000	

Padang, Oktober 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Ir. MASWAL NOOR, M.Si
NIP. 19670122 199301 1 001